

Optimalisasi Administrasi Perjanjian Kerja Sama Antar-Daerah dalam Mendukung Kelancaran Misi Dagang Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur

Wulan Maizahra¹, Achmad Hairudin², Agus Satrya Wibowo³, Wahyu Febri Eka Susanti⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Palangka Raya^{1,3,4}

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah²

e-mail: wlnmaizahra2005@gmail.com¹, pahai1970@gmail.com²,
agus.wibowo@feb.upr.ac.id³, wahyufes@feb.upr.ac.id⁴

Abstrak

Pembangunan daerah yang merata masih menjadi tantangan utama di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh lemahnya administrasi dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan administrasi perjanjian kerja sama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dagang antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur melalui program magang mandiri MBKM. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi pengelolaan dokumen, pengarsipan surat, penyusunan bahan paparan, serta pendampingan pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa administrasi yang tertib dan terstruktur mampu meningkatkan efisiensi koordinasi antar instansi dan mendukung keberhasilan misi dagang yang mencatatkan transaksi lebih dari Rp2,08 triliun. Program ini terbukti memberikan manfaat timbal balik bagi mahasiswa dan instansi pemerintah dalam mendukung kerja sama antar daerah yang efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: *Administrasi, Kerja Sama Antar Daerah, Misi Dagang, Magang MBKM, UMKM.*

Abstract

Equitable regional development remains a major challenge in Indonesia, partly due to weak administration in inter-regional cooperation. This community service activity aims to optimize inter-regional cooperation agreement administration to support the trade mission between Central Kalimantan and East Java Provinces through the MBKM independent internship program. A participatory approach was employed, involving document management, correspondence filing, presentation preparation, and SME accompaniment. Results indicate that orderly and structured administration improved inter-agency coordination efficiency and supported the trade mission's success, which recorded transactions exceeding IDR 2.08 trillion. This program proved mutually beneficial for students and government agencies in supporting effective and accountable inter-regional cooperation.

Kata Kunci: *Administration, Cooperation, Trade Mission, MBKM Internship, SMEs.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang merata merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perbedaan potensi sumber daya, kapasitas kelembagaan, serta akses terhadap pasar menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah (Azhari & Kurniawan, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu mendorong sinergi dan kolaborasi antar daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah melalui kerja sama antar daerah. Kerja sama ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi pembangunan serta memperkuat jaringan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, kerja sama antar daerah merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Melalui kerja sama ini, daerah dapat saling melengkapi potensi yang dimiliki sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan, sekaligus menyelaraskan pembangunan, meningkatkan pertukaran pengetahuan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Novitasari et al., 2025; Subianto et al., 2017; Pratama dkk., 2025)

Dalam konteks penguatan ekonomi daerah, kerja sama antar daerah dapat diwujudkan melalui kegiatan misi dagang. Misi dagang merupakan program strategis yang bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada mitra kerja sama. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta pelaku usaha. Dalam era transformasi digital saat ini, efektivitas misi dagang juga semakin ditopang oleh pemanfaatan teknologi dan platform digital sebagai sarana promosi dan perluasan jaringan pemasaran (Fathoni & Asfiah, 2024).

Kegiatan misi dagang antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur menjadi salah satu bentuk nyata implementasi kerja sama antar daerah. Kegiatan ini berhasil mencatatkan nilai transaksi yang signifikan, yaitu mencapai sekitar Rp2,08 triliun, yang mencerminkan keberhasilan kolaborasi ekonomi antar wilayah (Klik Jatim, 2026; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2026). Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pelaku usaha yang semakin memanfaatkan identitas digital dan media promosi dalam memperluas jangkauan pasar (Hermati dkk., 2025). Selain itu, kerja sama ini juga diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan (Setda Kalteng, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki landasan administratif yang kuat.

Namun, dalam pelaksanaannya, kerja sama antar daerah tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti kompleksitas koordinasi antar instansi, perbedaan kebijakan, serta keterbatasan infrastruktur dan kompleksitas administrasi. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menghambat efektivitas

pelaksanaan kegiatan kerja sama (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2026). Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi administrasi perjanjian kerja sama antar daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan misi dagang.

Dalam rangka mendukung optimalisasi tersebut, mahasiswa dapat berperan aktif melalui program magang di instansi pemerintahan. Program magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran berbasis pengalaman yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata di dunia kerja. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung seperti ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi, karena peserta tidak hanya menerima pengetahuan secara teoritis tetapi juga terlibat langsung dalam proses kerja yang nyata (Busman et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan administrasi kerja sama antar daerah melalui pendekatan yang sistematis dan kolaboratif guna mendukung efektivitas pelaksanaan misi dagang. Penguatan administrasi perjanjian kerja sama, penyusunan dokumen yang tertib, serta koordinasi antar instansi yang baik menjadi strategi yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut.

Oleh karena itu, kegiatan magang mandiri dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam optimalisasi administrasi perjanjian kerja sama antar daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kerja Sama, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi administratif, memperkuat pemahaman mengenai tata kelola kerja sama antar daerah, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran pelaksanaan misi dagang antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur sebagai wujud penerapan ilmu secara langsung di lingkungan pemerintahan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan administrasi dan pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada pelaksanaan misi dagang antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur selama program magang mandiri MBKM di Bagian Kerja Sama, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sehingga kegiatan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan manfaat berupa pendampingan dan berbagi pengetahuan terkait administrasi serta promosi usaha (Kemendikbudristek, 2020).

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan misi dagang serta aparaturnya yang menangani administrasi kerja sama antar daerah. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026 di Hotel Bahalap Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan pelaku UMKM dan administrasi kerja sama
Tahap awal dilakukan melalui observasi dan koordinasi dengan pihak biro serta pelaku UMKM untuk mengetahui kebutuhan administrasi, informasi produk, dan bentuk dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan misi dagang.
2. Pendampingan administrasi dan pengelolaan dokumen
Mahasiswa membantu proses penyusunan dan pengelolaan dokumen administrasi kerja sama, seperti nota dinas, notulen rapat, pengarsipan surat, serta dokumen pendukung kegiatan misi dagang.
3. Pengolahan data dan dokumentasi kegiatan
Kegiatan ini meliputi input dan pengelolaan data kerja sama serta dokumentasi kegiatan misi dagang sebagai bentuk tertib administrasi dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
4. Partisipasi dan pendampingan dalam kegiatan misi dagang
Mahasiswa terlibat langsung dalam pelaksanaan misi dagang antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur dengan membantu koordinasi kegiatan serta mendampingi pelaku UMKM selama proses promosi dan interaksi bisnis berlangsung.

Melalui kegiatan tersebut, pengabdian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesiapan administrasi dan promosi pelaku UMKM dalam kegiatan misi dagang, sekaligus mendukung optimalisasi kerja sama antar daerah antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan administrasi dan promosi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan misi dagang antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur memberikan manfaat dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha mengikuti kegiatan kerja sama antar daerah. Kegiatan pengabdian tidak hanya berfokus pada dukungan administrasi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga membantu pelaku UMKM dalam menyiapkan informasi produk, administrasi pendukung, serta proses koordinasi selama kegiatan berlangsung.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan administrasi sekaligus membantu pelaku UMKM memahami pentingnya kesiapan dokumen dan penyajian informasi usaha dalam kegiatan promosi dagang. Hal ini sejalan dengan pendapat Azhari & Kurniawan (2022) yang menyatakan bahwa administrasi yang tertib dan

terstruktur dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama dan pelayanan publik.

Pendampingan Administrasi dan Dokumen Kegiatan

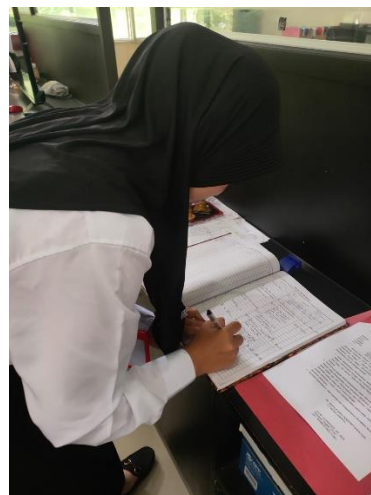
Salah satu bentuk kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah pendampingan administrasi kepada pelaku UMKM dan pihak terkait dalam kegiatan misi dagang. Pendampingan dilakukan melalui bantuan pengelolaan dokumen kegiatan, penyusunan nota dinas, penyiapan data produk, serta pengarsipan dokumen kerja sama. Mahasiswa turut membantu memastikan kelengkapan dokumen yang digunakan selama kegiatan berlangsung sehingga proses koordinasi menjadi lebih efektif dan terstruktur.



Gambar 1. Rapat Misi Dagang Mengenai Produk Yang Akan Diromosikan

Selain itu, mahasiswa juga membantu pelaku UMKM dalam menyiapkan informasi produk yang akan dipromosikan pada kegiatan misi dagang. Informasi tersebut meliputi identitas usaha, jenis produk, serta data pendukung lainnya yang diperlukan dalam kegiatan promosi dan kerja sama bisnis. Pendampingan ini membantu pelaku usaha lebih siap dalam mengikuti kegiatan promosi antar daerah.

Temuan ini memperkuat hasil pengabdian Taufik & Hikmah (2025) yang menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan administrasi mampu membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pegawai.



Gambar 2. Penomoran Perjanjian Kerja Sama dan Nota Dinas

Nota dinas menjadi instrumen komunikasi resmi yang digunakan secara intensif dalam koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan misi dagang. Mahasiswa turut membantu penyusunan dan pendistribusian nota dinas, termasuk memastikan kesesuaian format dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku. Sementara itu, notulen rapat disusun sebagai rekam jejak hasil pembahasan dalam setiap pertemuan koordinasi, yang kemudian menjadi acuan tindak lanjut kegiatan kerja sama. Penyusunan notulen yang akurat terbukti meminimalisir potensi miskomunikasi antar pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini senada dengan temuan Hoiriah (2025) dalam pengabdian di DISPARBUDPORA Kota Palangka Raya, yang menunjukkan bahwa pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan yang sistematis berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian di instansi pemerintah daerah.

Pendampingan administrasi yang dilakukan juga membantu meningkatkan kerapian pengelolaan dokumen kerja sama dan data pendukung kegiatan misi dagang. Dokumen yang tersusun dengan baik mempermudah proses koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM selama kegiatan berlangsung. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama & Rahmanto (2021) yang menyebutkan bahwa pengelolaan administrasi yang baik dapat mendukung efektivitas pelayanan dan tata kelola kegiatan pemerintahan.

Pendampingan dalam Kegiatan Misi Dagang

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan misi dagang menjadi bentuk implementasi langsung pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan terhadap pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu proses koordinasi kegiatan, penyediaan informasi, serta mendampingi pelaku usaha selama pelaksanaan promosi produk dan interaksi bisnis berlangsung.



Gambar 3. Rapat Final Misi Dagang Antara Kalimantan Tengah dan Jawa Timur

Melalui keterlibatan aktif dalam pengelolaan dokumen tersebut, terlihat adanya peningkatan keteraturan dan kelengkapan dokumen kerja sama di Bagian Kerja Sama, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dokumen yang sebelumnya

belum sepenuhnya tertata menjadi lebih terstruktur dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung efisiensi kerja pegawai dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Temuan ini sejalan dengan Pratama & Rahmanto (2021) yang menyimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa magang dalam pengelolaan administrasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola dokumen di instansi pemerintah. Selain itu, Prasetyo & Kholifah (2021) menambahkan bahwa keberadaan mahasiswa di lingkungan kerja birokratis dapat mendorong adopsi pendekatan baru yang lebih adaptif dalam pengelolaan informasi dan dokumen.

Kegiatan pendampingan ini memberikan manfaat bagi pelaku UMKM karena membantu mereka memahami alur kegiatan misi dagang, kesiapan administrasi, serta pentingnya penyajian informasi produk secara sistematis. Selain itu, keterlibatan mahasiswa juga membantu memperlancar komunikasi antara pihak penyelenggara dan pelaku usaha selama kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan Misi Dagang

Pelaksanaan misi dagang antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur menghasilkan capaian transaksi yang mencapai lebih dari Rp2,08 triliun (Klik Jatim, 2026; Ketik.com, 2026). Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama antar daerah memiliki potensi besar dalam memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM.



Gambar 4. Produk UMKM Kalimantan Tengah



Gambar 5. Produk UMKM Jawa Timur



Gambar 6. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama Misi dagang dan Investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Tengah

Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi antar wilayah (Metro TV News, 2026; Seputar Borneo, 2026). Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) turut menjadi dasar penting dalam menjamin keberlanjutan kerja sama, sekaligus mencerminkan bahwa kerja sama antar daerah tidak hanya bersifat seremonial tetapi memiliki landasan administratif yang kuat (Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2026; Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah, 2026). Hal ini memperkuat pandangan Novitasari et al. (2025) yang menyatakan bahwa kerja sama antar daerah yang dilandasi dokumen formal yang tertib akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertukaran pengetahuan antar wilayah.

Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kesiapan administrasi, dukungan informasi, serta pengolahan data yang akurat dan terstruktur, yang membantu pimpinan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan selama pelaksanaan misi dagang. Hal ini sejalan dengan Novitasari dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kerja sama antar daerah yang didukung administrasi tertib, koordinasi yang baik, dan pengelolaan data yang tepat akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Temuan ini senada dengan hasil pengabdian Taufik & Hikmah (2025) yang menyimpulkan bahwa mahasiswa magang MBKM yang terlibat dalam pengolahan dan pemrosesan data di instansi pemerintah mampu mempercepat proses operasional dan meningkatkan efektivitas pelayanan secara keseluruhan.

Upaya Optimalisasi dan Dampak Kegiatan

Kegiatan pengabdian melalui program magang mandiri MBKM ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan misi dagang. Pendampingan

administrasi dan dukungan promosi yang diberikan membantu pelaku usaha lebih siap mengikuti kegiatan kerja sama dan memperluas peluang pemasaran produk.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian melalui magang mandiri MBKM ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar dari instansi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas administrasi kerja sama antar daerah. Keterlibatan aktif dalam pengelolaan dokumen, penyusunan bahan paparan, pengolahan data, dan partisipasi langsung dalam misi dagang menjadi pengalaman yang memperkuat kompetensi administratif dan manajerial penulis sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel (Wulandari & Hardika, 2022).

Selain meningkatkan efektivitas administrasi kegiatan, pengabdian ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam menerapkan kemampuan komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan administrasi secara langsung di lapangan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi sekaligus membantu pemberdayaan pelaku UMKM dalam kegiatan kerja sama antar daerah.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui program magang mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Bagian Kerja Sama, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah membuktikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan administrasi kerja sama antar daerah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keteraturan dokumen, kelancaran koordinasi antar instansi, serta kesiapan pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan misi dagang.

Partisipasi langsung dalam misi dagang antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa administrasi yang tertib, pengelolaan data yang akurat, serta dukungan informasi yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan kerja sama antar daerah. Hal ini tercermin dari capaian transaksi yang mencapai lebih dari Rp2,08 triliun, yang juga ditopang oleh penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan administratif kerja sama yang berkelanjutan.

Program magang mandiri MBKM ini terbukti memberikan manfaat timbal balik, yakni meningkatkan kompetensi administratif dan manajerial mahasiswa sekaligus mendukung operasional instansi. Oleh karena itu, program serupa perlu terus dikembangkan secara sistematis sebagai wujud sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F., & Kurniawan, B. (2022). Kerja sama antar daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional. *Publika*, 10(3), 901–916.
- Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah. (2026). Tingkatkan konektivitas Kalteng dan Jatim melalui misi dagang dan investasi. Diakses dari <https://biroadpim.kalteng.go.id>
- Busman, S., Nurasia, N., Santoso, A., & Miswaty, T. C. (2025). Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi mikro dan manajemen berbasis potensi lokal. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(2). Diakses dari <https://dmi-journals.org/jai/>
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. (2026). Misi dagang Jatim ke Kalimantan Tengah capai transaksi Rp2,08 triliun: Disperindag perkuat sinergi perdagangan antarwilayah. Diakses dari <https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=misi-dagang-jatim-ke-kalimantan-tengah-capai-transaksi-rp2-08-triliun-disperindag-perkuat-sinergi-perdagangan-antarwilayah>
- Fathoni, I., & Asfiah, N. (2024). Transformasi digital bisnis UMKM di Indonesia setelah masa pandemi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 10219–10236. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11354>
- Hoiriah, M. (2025). Pengabdian mahasiswa MBKM magang dalam kegiatan layanan administrasi umum kepegawaian DISPARBUDPORA Kota Palangka Raya. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 365–372. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v3i2.1587>
- Kemendikbudristek. (2020). *Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses dari <https://kemdiktisaintek.go.id/pengumuman/buku-panduan-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>
- Ketik.com. (2026). Misi dagang Jatim–Kalteng tembus Rp2,082 triliun. Diakses dari <https://ketik.com>
- Klik Jatim. (2026). Misi dagang Jatim–Kalteng sukses besar, transaksi Rp2,082 triliun. Diakses dari <https://klikjatim.com>
- Metro TV News. (2026). Perkuat sinergi ekonomi antar daerah melalui misi dagang. Diakses dari <https://metrotvnews.com>
- Novitasari, F., Mardiana, M., & Ditia, N. A. P. (2025). Analisis implementasi kerja sama antar daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendorong pembangunan ekonomi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(10).
- Hermati, N. F., Fikri, C. A., Maulana, R. D., & Mustafa, I. (2025). Pembuatan logo sebagai identitas visual UMKM Nasi Padang Ampera One sebagai upaya meningkatkan daya tarik konsumen. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 3(4), 143–153. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v3i4.2134>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor

- 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Prasetyo, Y., & Kholifah, N. (2021). Inovasi mahasiswa magang dalam tata kelola birokrasi daerah: Studi kasus pada instansi pemerintah provinsi. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 89-99.
- Pratama, R., & Rahmanto, A. (2021). Efektivitas magang mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi administrasi di instansi pemerintah. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 11(1), 88-97.
- Setda Provinsi Kalimantan Tengah. (2026). Kalteng dan Jatim tandatangani MoU misi dagang dan investasi tahun 2026. Diakses dari <https://setda.kalteng.go.id>
- Seputar Borneo. (2026). Kalteng-Jatim perkuat kerja sama ekonomi melalui misi dagang. Diakses dari <https://seputarborneo.com>
- Setiawan, D. (2022). Magang MBKM sebagai sarana penguatan keterampilan profesional mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Inovatif*, 8(2), 113-125.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Surabaya: Brilliant. Diakses dari https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan%20Publik_151220_opt.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Pratama, A. T., Putri, D. G., Mayasari, M., & Malik, A. M. E. Sy. (2025). Tantangan dan peluang otonomi daerah dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1). <https://doi.org/10.52655/KHG.V8I1.103>
- Taufik, A., & Hikmah, N. (2025). Pengabdian mahasiswa magang MBKM Prodi Manajemen Pendidikan Islam dalam peningkatan kualitas layanan informasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 92-99. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v3i1.1079>
- Wulandari, L., & Hardika, D. (2022). Dampak program MBKM terhadap pelayanan publik di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(3), 234-245.